

Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Banten

Shifwa Yusriyarli¹, Adlina Ammarotul Idzni²

^{1,2} Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: * shifwayusriyarli@gmail.com

Abstrak

Analysis implementation of fiscal decentralization policies in the management of Banten Province's Original Regional Revenue (PAD) using data from the 2024 Regional Budget (APBD) as an empirical basis. The study aims to assess the extent to which fiscal decentralization promotes regional fiscal independence through an analysis of revenue and expenditure structures, and to identify obstacles that reduce the optimization of PAD as a source of development financing. The approach used is qualitative through a review of APBD documents, regional financial statistics, and national literature on fiscal decentralization and PAD, which are analyzed descriptively using an interactive analysis model. The results show that PAD contributes approximately three-quarters of total regional revenue and is dominated by regional taxes, reflecting a relatively strong fiscal capacity but is not yet fully independent due to the still large dependence on central transfers. In terms of expenditure, the main portion of the budget is still absorbed for operational expenditures, while the allocation for capital expenditures is relatively small, limiting fiscal space for long-term investment. These findings confirm that the success of fiscal decentralization is determined not only by the amount of PAD, but also by the diversification of revenue sources and more productive expenditure management to strengthen the fiscal independence of Banten Province.

Keyword:
Fiscal
Decentralization;
Regional
Original
Income;
Fiscal
Independence

Abstrak

Analisis Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten dengan menggunakan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar empiris. Penelitian bertujuan menilai sejauh mana desentralisasi fiskal mendorong kemandirian fiskal daerah melalui analisis struktur pendapatan dan belanja, serta mengidentifikasi hambatan yang mengurangi optimalisasi PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif melalui telaah dokumen APBD, statistik keuangan daerah, dan literatur nasional mengenai desentralisasi fiskal dan PAD yang dianalisis secara deskriptif dengan model analisis interaktif. Hasil menunjukkan bahwa PAD menyumbang sekitar tiga perempat total pendapatan daerah dan didominasi pajak daerah, mencerminkan kapasitas fiskal yang relatif kuat namun belum sepenuhnya mandiri karena ketergantungan pada transfer pusat masih besar. Dari sisi belanja, porsi utama anggaran masih terserap untuk belanja operasional, sedangkan alokasi belanja modal relatif kecil sehingga ruang fiskal untuk investasi jangka panjang menjadi terbatas. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh besaran PAD, tetapi juga oleh diversifikasi sumber pendapatan dan pengelolaan belanja yang lebih produktif guna memperkuat kemandirian fiskal Provinsi Banten.

Kata Kunci:
Desentralisasi
Fiskal;
Pendapatan Asli
Daerah;
Kemandirian
Fiskal.

Pendahuluan

Kebijakan yang dikenal sebagai desentralisasi fiskal memberikan pemerintah daerah kewenangan untuk mengelola keuangan publik dengan cara yang lebih efisien untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam konteks otonomi daerah,

kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber pendapatan sendiri. Menurut Ningsih et al., (2023), desentralisasi fiskal merupakan instrumen penting untuk memperkuat peran daerah dalam pengambilan keputusan fiskal. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya

menghasilkan kemandirian fiskal yang merata antar daerah.

Implementasi kebijakan publik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelaksanaan aturan formal, melainkan sebagai proses yang dipengaruhi oleh kapasitas aktor, dinamika institusional, dan konteks sosial ekonomi tempat kebijakan dijalankan. Pendekatan ini menempatkan kebijakan sebagai praktik pemerintahan yang memerlukan pemahaman substansial, bukan sekadar kepatuhan administratif. Oleh karena itu, analisis kebijakan perlu melihat sejauh mana pemerintah daerah mampu menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan nyata dan pengelolaan sumber daya yang relevan (Riswanda, 2024).

Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mekanisme transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DRF) memungkinkan desentralisasi fiskal di Indonesia. PAD adalah ukuran penting dari kemampuan suatu daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri. Penelitian oleh Hanifah et al., (2020), menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal kuat lebih mampu memanfaatkan kebijakan desentralisasi fiskal dibandingkan daerah dengan basis ekonomi lemah.

Penelitian nasional telah menunjukkan bahwa ada hubungan yang kompleks antara desentralisasi fiskal dan ketidaksetaraan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi regional. Beberapa penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan ini dapat mengurangi ketidaksetaraan, tetapi hasilnya sangat bergantung pada kapasitas fiskal dan struktur ekonomi masing-masing wilayah. Wilayah dengan basis pendapatan lokal yang kuat cenderung lebih diuntungkan daripada wilayah dengan kapasitas fiskal yang lebih rendah. Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa desain kebijakan dan penerapan desentralisasi fiskal berpengaruh pada seberapa efektif itu.

Empiris tentang desentralisasi fiskal di Indonesia menunjukkan bahwa kebanyakan penelitian berkonsentrasi pada mengukur tingkat desentralisasi dan bagaimana hal itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan ketidaksetaraan. Sementara itu, belum ada penelitian yang mendalam tentang bagaimana kebijakan desentralisasi fiskal diterapkan di tingkat pemerintah provinsi. Didukung oleh penelitian Ningsih et al., (2023), menekankan

bahwa peran pemerintah provinsi sangat strategis dalam koordinasi fiskal antar kabupaten dan kota. Oleh karena itu, kajian pada tingkat provinsi menjadi penting untuk memahami dinamika implementasi kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian yang lebih khusus diperlukan untuk memahami bagaimana kebijakan desentralisasi fiskal diterapkan di tingkat provinsi.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengumpulkan pendapatan dan mengalokasikannya untuk membiayai pengeluaran publik. Analisis struktur APBD sangat penting untuk melihat keadaan implementasi desentralisasi fiskal di tingkat daerah. menilai efektivitas kebijakan fiskal. Tabel 1. menunjukkan struktur pendapatan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 (Rp). Ini berfungsi sebagai contoh langsung dari pengelolaan fiskal daerah.

Tabel 1. Struktur Pendapatan dan Belanja APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 (Rp)

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8.668.052.033.549
Pajak Daerah	8.284.849.811.619
Retribusi Daerah	214.752.691.760
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	58.558.590.039
Lain-lain PAD yang Sah	109.890.940.131
Pendapatan Transfer	3.071.630.609.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah)	6.326.763.490
Total Pendapatan Daerah	11.746.009.406.039
Total Belanja Daerah	11.866.009.406.039
Surplus/Defisit	(120.000.000.000)

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa APD Provinsi Banten mencapai Rp 8,67 triliun, atau sekitar 73,8% dari pendapatan nasional. Dibandingkan dengan daerah yang sangat bergantung pada transfer pusat, Banten memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar, seperti yang ditunjukkan oleh dominasi pajak daerah dalam struktur APD. Namun, pendapatan transfer yang masih mencapai Rp 3,07 triliun menunjukkan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat belum sepenuhnya dihilangkan. Struktur ini menunjukkan kemajuan menuju kemandirian keuangan yang lebih kuat.

Provinsi Banten membelanjakan 11,87 triliun rupiah untuk Tahun Anggaran 2024, dengan anggaran terbesar ditanggung oleh Pengeluaran untuk operasional, terutama untuk personel dan barang dan jasa. Pengeluaran modal sebesar Rp 1,16 triliun menunjukkan bahwa anggaran masih terbatas untuk kegiatan produktif dibandingkan dengan pengeluaran rutin. Karena tanpa manajemen pengeluaran yang strategis, PAD (jumlah penerimaan daerah) tidak akan optimal, kondisi ini penting untuk desentralisasi fiskal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tata kelola pengeluaran daerah sangat memengaruhi efektivitas desentralisasi fiskal. (Aswar & Primta Surbakti, 2013)

Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi penerapan kebijakan desentralisasi fiskal dalam pengelolaan pendapatan daerah (PAD) Provinsi Banten, menggunakan data anggaran daerah (APBD) sebagai dasar empiris. Artikel ini tidak hanya memeriksa ukuran PAD tetapi juga mengaitkannya dengan struktur pengeluaran dan pendapatan daerah sebagai ukuran kemandirian fiskal. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan desentralisasi fiskal diterapkan dalam pengelolaan PAD Provinsi Banten dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam meningkatkan autonomi fiskal daerah. Akibatnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penerapan kebijakan desentralisasi fiskal digunakan dalam pengelolaan PAD Provinsi Banten sebagai dasar untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkapkan data melalui penjelasan verbal tentang fenomena. (Sugiyono dalam

Dirli et al., 2025). Penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan berbagai fenomena sosial dan masalah yang berkaitan dengan manusia. (Creswell dalam Murdiyanto, 2020). Metode ini digunakan untuk menilai implementasi kebijakan fiskal dalam pengelolaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Provinsi Banten. Tinjauan literatur dan dokumen yang relevan digunakan untuk melakukan ini.

Data utama yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur. Data ini diambil dari publikasi statistik keuangan daerah, Peraturan Provinsi Banten tentang Anggaran Daerah Tahun 2024 (APBD), dan jurnal nasional yang membahas desentralisasi fiskal dan pendapatan asli daerah. Untuk mendapatkan informasi konseptual dan empiris yang berkaitan dengan subjek penelitian, tinjauan literatur dilakukan.

Model analisis interaktif digunakan untuk melakukan analisis data, yang mencakup proses pengumpulan, ringkasan, penyajian, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan (Miles et al., 2013). Struktur pendapatan daerah (PAD) dan pendapatan daerah Provinsi Banten digambarkan dalam tabel. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengaitkannya dengan gagasan desentralisasi fiskal dan hasil penelitian sebelumnya.

Hasil dan Diskusi

4.1 Gambaran Desentralisasi Fiskal Provinsi Banten

Kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan mereka sendiri dibandingkan dengan ketergantungan mereka pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat menunjukkan desentralisasi fiskal di tingkat daerah. Salah satu cara penting untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal suatu daerah adalah dengan melihat kontribusi PPN terhadap total pendapatan daerah. Ningsih et al., (2023), menyatakan bahwa semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi derajat desentralisasi fiskalnya. Oleh karena itu, analisis struktur pendapatan daerah menjadi langkah awal dalam memahami desentralisasi fiskal Provinsi Banten. Menurut data dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPN) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, PPN menyumbang sebesar 8,67 triliun dari total pendapatan daerah sebesar 11,74 triliun, sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih

mencapai 3,07 triliun, menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat belum sepenuhnya dihilangkan. Di bawah ini adalah rincian komposisi pendapatan daerah Provinsi Banten.

Tabel 2. Komposisi Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024

Komponen Pendapatan	Nilai (Rp)	Persentase (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8.668.052.033.549	73,8
Pendapatan Transfer	3.071.630.609.000	26,2
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.326.763.490	0,05
Total Pendapatan	11.746.009.406.039	100

Sumber: Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Menurut Tabel 4.1, kontribusi PAD yang melebihi 70% menunjukkan tingkat desentralisasi fiskal yang relatif tinggi di Kabupaten Banten. Ritonga dan Alam (2020) mengatakan bahwa wilayah yang menerima PAD lebih dari 50% biasanya memiliki kemandirian fiskal yang lebih baik. *Irmanelly et al., (2025)*, juga menekankan bahwa peningkatan PAD mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Temuan ini secara kuantitatif menunjukkan bahwa Provinsi Banten memiliki kapasitas fiskal yang cukup kuat.

Tidak selalu kontribusi PAD yang tinggi menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal berjalan dengan baik. *Aswar & Primta Surbakti, (2013)*, menekankan bahwa evaluasi tingkat desentralisasi fiskal harus dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan struktur ekonomi dan kapasitas institusional daerah. Fakta bahwa Provinsi Banten memiliki pendapatan transfer yang signifikan menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya efektif. Karena mereka sebagian bergantung pada transfer pusat, pembiayaan untuk program pembangunan yang mandiri terbatas.

Daerah dengan pendapatan daerah (PPH) yang tinggi masih menghadapi banyak tantangan, menurut *Hanifah et al., (2020)*, daerah dengan kontribusi PAD yang besar umumnya memiliki fleksibilitas fiskal lebih tinggi. Situasi ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan dan tingkat pendapatan daerah terkait dengan desentralisasi fiskal. Kapasitas fiskal Provinsi Banten cukup besar, tetapi kemandirian fiskal tidak selalu dicapai dengan desentralisasi. Akibatnya, dominasi pendapatan daerah (PPH) harus diimbangi dengan kebijakan fiskal yang mendorong pengeluaran produktif dan pembangunan jangka panjang.

4.2 Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pemberlakuan kebijakan desentralisasi fiskal di tingkat daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber Pendapatan Dalam Negeri (PPN). Penghasilan adalah bagian dari pengelolaan PPN dan strategi kebijakan yang digunakan untuk menilai potensi ekonomi suatu wilayah. Menurut *Aswar & Primta Surbakti, (2013)*, efektivitas desentralisasi fiskal secara signifikan dipengaruhi oleh kemampuan suatu wilayah untuk mendiversifikasi sumber pendapatannya dan mengurangi ketergantungannya pada satu sumber. Oleh karena itu, untuk menilai efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal, analisis struktur PPN Provinsi Banten sangat penting.

Keberhasilan implementasi kebijakan desentralisasi fiskal sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memahami arah kebijakan serta mengintegrasikannya ke dalam praktik birokrasi dan pengelolaan anggaran. Ketika pemahaman kebijakan masih bersifat administratif, implementasi cenderung berjalan prosedural tanpa menghasilkan perubahan substantif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas institusional dan pemahaman kebijakan menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan desentralisasi fiskal di tingkat daerah (*Riswanda, 2023*).

Menurut data dari Anggaran Negara (PPN) Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2024, pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan PPN, menyumbang

lebih dari 95% dari total PPN. Pungutan daerah dan hasil dari pengelolaan berbagai aset daerah masih sangat kecil. Situasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan PPN Provinsi Banten masih bergantung pada alat fiskal tertentu. Struktur Pendapatan Dalam Negeri (PPN) Provinsi Banten digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Struktur Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024

Jenis PAD	Nilai (Rp)	Persentase (%)
Pajak Daerah	8.284.849.811.619	95,6
Retribusi Daerah	214.752.691.760	2,5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	58.558.590.039	0,7
Lain-lain PAD yang Sah	109.890.940.131	1,2
Total PAD	8.668.052.033.549	100

Sumber: Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Fakta bahwa pajak daerah mendominasi struktur PAD menunjukkan bahwa fokus kebijakan desentralisasi fiskal Provinsi Banten masih pada pengoptimalan sumber pendapatan konvensional. [Immanuelly et al., \(2025\)](#) menyatakan bahwa kontribusi pungutan daerah yang rendah menunjukkan bahwa layanan publik dan aset daerah digunakan secara tidak efektif sebagai sumber pendapatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada keterbatasan dalam variasi kebijakan pengelolaan PAD.

Kontribusi minimal untuk pengelolaan aset daerah juga menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dilaksanakan secara tidak efisien. Struktur pendapatan daerah (PAD) Provinsi Banten yang masih berfokus pada pajak daerah berpotensi menimbulkan risiko fiskal. Situasi ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan desentralisasi fiskal memerlukan keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi daerah dan optimalisasi pendapatan.

Dengan pajak daerah sebagai sumber pendapatan utama, kebijakan desentralisasi fiskal dalam pengelolaan PAD Provinsi Banten telah menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat. Namun, diversifikasi struktur PAD yang tidak ideal menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak dapat diterapkan dengan baik. Meningkatkan kemandirian fiskal secara

berkelanjutan memerlukan penguatan kebijakan pengelolaan pungutan dan aset daerah. Situasi ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal Provinsi Banten masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan otonomi fiskal yang optimal.

4.3 Tantangan Implementasi dan Implikasi terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Evaluasi kebijakan publik memerlukan kesesuaian antara tujuan kebijakan, instrumen yang digunakan, dan realitas pelaksanaan di lapangan. Ketidaksinkronan antara ketiga aspek tersebut berpotensi menyebabkan kebijakan berjalan secara administratif tanpa mencapai dampak yang diharapkan. Dalam konteks desentralisasi fiskal, kondisi ini dapat terlihat ketika peningkatan pendapatan daerah tidak diikuti dengan pengelolaan anggaran yang produktif dan berorientasi pembangunan ([Riswanda, 2024](#)).

Kemampuan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PPN) dan manajemen pengeluaran daerah merupakan masalah utama dalam penerapan kebijakan desentralisasi fiskal. Tujuan desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian dan pertumbuhan ekonomi mungkin terhambat oleh struktur pengeluaran yang tidak efisien. Oleh karena itu, untuk menilai dampak kebijakan fiskal terhadap kemandirian daerah, analisis struktur pengeluaran daerah Provinsi Banten sangat penting.

Berdasarkan data dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPN) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, pengeluaran daerah masih didominasi oleh biaya operasional, terutama yang berkaitan dengan biaya personel dan barang dan jasa. Namun, alokasi untuk pengeluaran modal relatif kecil dibandingkan dengan pengeluaran daerah secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk membiayai tugas pemerintah sehari-hari. Tabel di bawah ini menunjukkan rincian struktur pengeluaran daerah Provinsi Banten.

Tabel 4. Struktur Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024

Jenis Belanja	Nilai (Rp)	Persentase (%)
Belanja pegawai	2.637.346.334.404	22,2

Belanja barang dan jasa	3.565.457.889.646	30,1
Belanja modal	1.163.654.397.284	9,8
Belanja hibah dan bantuan sosial	1.015.624.655.909	8,6
Belanja lainnya & Transfer	3.483.926.456.836	29,3
Total belanja daerah	11.866.009.406.039	100

Sumber: Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Fakta bahwa pengeluaran operasional masih mendominasi struktur pengeluaran daerah menunjukkan bahwa masih ada sedikit ruang fiskal untuk investasi dalam pembangunan jangka panjang. Pengeluaran modal memiliki peran strategis dalam meningkatkan basis ekonomi daerah dan mendorong peningkatan pendapatan daerah (PAD). Mungkin sulit untuk memaksimalkan manfaat desentralisasi fiskal karena proposal pengeluaran modal yang rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah tidak sepenuhnya ditujukan untuk menjaga kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

Meningkatnya ketergantungan daerah pada pendapatan transfer untuk pembiayaan pembangunan adalah konsekuensi tambahan dari struktur pengeluaran ini. Provinsi Banten, bergantung pada Transfer pusat menunjukkan bahwa kemandirian fiskal belum sepenuhnya tercapai meskipun PAD relatif tinggi. Ini menunjukkan adanya perbedaan antara kapasitas pendapatan dan efektivitas pengelolaan anggaran.

Penelitian oleh (Irmanelly et al., 2025), menekankan bahwa kemampuan daerah untuk mengalokasikan anggaran secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mereka adalah ukuran keberhasilan desentralisasi fiskal. Dampak positif desentralisasi fiskal terhadap pembangunan daerah dapat dikurangi oleh struktur pengeluaran yang tidak ideal. Situasi ini menunjukkan bahwa upaya untuk menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Banten menghadapi masalah teknis selain masalah yang berkaitan dengan orientasi kebijakan penganggaran daerah.

Salah satu masalah utama dalam menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Banten adalah mengoptimalkan struktur pengeluaran daerah untuk menjadi lebih produktif dan berorientasi pada hasil dalam jangka panjang. Peningkatan pengeluaran modal yang mendukung penguatan basis ekonomi daerah harus mengimbangi dominasi pengeluaran operasional. Diharapkan bahwa pengelolaan pengeluaran yang lebih strategis akan meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal sebagian besar bergantung pada seberapa baik tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan desentralisasi fiskal dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PPN) Provinsi Banten menunjukkan kapasitas fiskal daerah yang relatif kuat; kontribusi PPN lebih dari 70% dari pendapatan daerah, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah. Tetapi tingkat kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya tercapai, karena banyak pendapatan masih ditransfer ke pemerintah pusat.

Selain pendapatan, cara pengeluaran di daerah memengaruhi efektivitas desentralisasi fiskal. Penelitian menunjukkan bahwa, meskipun proporsi pengeluaran modal relatif kecil, pengeluaran operasional masih mendominasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Provinsi Banten. Meskipun kapasitas pendapatan daerah relatif tinggi, situasi ini dapat membatasi upaya untuk meningkatkan basis ekonomi daerah dan mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Banten melakukan diversifikasi sumber PAD melalui optimalisasi retribusi daerah dan pengelolaan aset daerah secara lebih efektif. Selain itu, diperlukan penataan kembali kebijakan belanja daerah dengan meningkatkan alokasi belanja modal yang bersifat produktif. Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk penguatan kapasitas fiskal dan tata kelola keuangan daerah juga diperlukan untuk mendorong keberhasilan desentralisasi fiskal

secara berkelanjutan.

Referensi

- Aswar, K., & Primta Surbakti, L. (2013). PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA PUBLIK KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA. *Teknik Sipil*, 5.
- Dirli, A, A. Jamaludin, U. Fitrayadi, S, D. (2025). Analisis Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Serang. *SAKOLA - Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 2(1), 300–307.
- Hanifah, H., Bayu, K., & Wardhana, A. (2020). Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 23(2), 179. <https://doi.org/10.31845/jwk.v23i2.666>
- Irmanelly, Veronica, D., Rahayu, Y., Asrini, Mainita, & Apriyani, S. D. (2025). MENGEVALUASI PERAN DESENTRALISASI FISKAL: ANALISIS TERHADAP PENURUNAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI DAERAH. *Jurnal Development*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analasys - A Methods Souchbook*.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.
- Riswanda. (2023). *Menerapkan Literasi Kebijakan Publik*. Madza Media.
- Riswanda. (2024). *Nalar Kebijakan - Bernalar Kritis dalam Sebuah Dialektika Kebijakan* (A. Rosidin & A. Havidani, Eds.). CV Sintesia.
- Shara Ningsih, K., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi Fiskal Dalam Peyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5389/http>